

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut

:

1. Alokasi Dana Desa berdampak baik terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan pemerdayaan masyarakat, karena dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkanseluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhanmasyarakat.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa digunakan sesuai tahapan perencanaan, pelaksanaa, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya dipergunakan sesuai dengan rencana yang telah di sepakati dalam musrembang realisasi atau hasil-hasil dari pembangunan tersebut dengan baik.
3. Alokasi dana desa berdampak baik terhadap pemberdayaan masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan peran Pemerintah Desa

1.2 Saran

Dari hasil penelitian, maka diberikan saran sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa indikator akuntabelmemiliki rata-rata terendah, maka saran yang bisa diberikan adalah pihakpemerintah harus memperhatikan tahapan Pengelolaan alokasi dana desa agarmelibatkan semua unsur-unsur masyarakat dan Pengelolaan alokasi danaharus disajikan secara terbuka, tranparan, dan tepat kepada seluru masyarakat desa, supaya mereka memberikan kepercayaan pada pemerintah desa dan tidak masa bodoh terhadap pemerintah desa.
2. Pemerintah desa harus melakukan laporan pertanggungjawaban atau lewat musyawarah dan melibatkan seluru masyarakat Desa Kenotan.
3. Pemerintah desa hendaknya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mehadapi masyarakat Desa Kenotan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anonim, Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undang.

.....Undang-undang. No. 32 Tahun 2004. Tentang pemerinta daerah

.....Undang-undang. No. 6 Tahun 2014. Tentang desa

Ginanjari, Kartasasmita. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan*

Hanif, Nurcholis. *Teori Praktik Pemerintah dan otonomi daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007

Henry, (2013) *pembangunan ekonomi jakarta 2013*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Penjelasan Mengenai Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Penjelasan Mengenai Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumaryadi, I Nyoman (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Citra Utama.

Todaro P Michael, Smith C Stephen, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*,

Edisi Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003.

-----2006. *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga

Jurnal dan Skripsi :

Amran Chalid Simarmata, 2016. Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.

Azzahro Iva Faizah, 2016. Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gubuklangkah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Maulana, 2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.